



## PERAN SURAT KABAR SUARA KARYA SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK GOLKAR TAHUN 1977-1982

**Azzahra Fianka<sup>1</sup>, Tubagus Umar Syarif Hadiwibowo<sup>2</sup>, Eko Ribawati<sup>3</sup>**

fiankaazzahra@gmail.com<sup>1\*</sup>, umarhadiwibowo90@untirta.ac.id<sup>2</sup>, eko.ribawati@untirta.ac.id<sup>3</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>1-3</sup>

### Informasi Artikel

#### Kata Kunci :

Suara Karya, Golkar, Komunikasi Politik, Orde Baru, Pemilu.

#### Keywords:

Suara Karya, Golkar, Political Communication, New Order, Election.



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Author.  
Published by Universitas Jambi

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah terbentuknya surat kabar Suara Karya, kemudian menjelaskan peran surat kabar Suara Karya sebagai media komunikasi politik Golkar tahun 1977—1982, serta strategi Suara Karya dalam menyampaikan agenda politik Golkar dan dampaknya terhadap pembentukan opini publik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terbagi dalam lima tahap yaitu, pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terbentuknya surat kabar Suara Karya didorong oleh kebutuhan untuk menaikkan elektabilitas Golkar menjelang keikutsertaannya dalam pemilu tahun 1971. Sebagai corong resmi pemerintah, kemenangan Golkar menjadi prioritas utama dan Suara Karya tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi tetapi juga mengarahkan opini publik melalui narasi yang

menekankan pentingnya stabilitas politik, pembangunan nasional, serta kesetiaan pada Pancasila. Selama masa kampanye pemilu tahun 1977 dan 1982, Suara Karya konsisten mendukung kemenangan Golkar melalui pemberitaan yang turut memperkuat dukungan publik terhadap Golkar sebagaimana tercermin dalam kemenangan Golkar pada dua pemilu tersebut, sementara oposisi disudutkan dengan nada negatif sebagai insiden atau pelanggaran. Dengan demikian, Suara Karya berperan penting sebagai instrumen komunikasi politik yang mendukung Orde Baru sekaligus menunjukkan bagaimana pers dijadikan sebagai alat kekuasaan.

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to describe the history of the formation of the Suara Karya newspaper, then to explain its role as a medium for Golkar's political communication from 1977 to 1982, as well as Suara Karya's strategy in conveying Golkar's political agenda and its impact on shaping public opinion. This research uses a historical method divided into five stages: topic selection, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results explain that the formation of Suara Karya newspaper was driven by the need to increase Golkar's electability ahead of its participation in the 1971 elections. As the official government mouthpiece, Golkar's victory was a top priority, and Suara Karya served not only to convey information but also to guide public opinion through narratives that emphasized the importance of political stability, national development, and loyalty to Pancasila. During the 1977 and 1982 election campaigns, Suara Karya consistently supported Golkar's victory through news coverage that strengthened public support for Golkar, as reflected in Golkar's victories in both elections, meanwhile the opposition was negatively criticized for incidents or violations. Thus, Suara Karya played an important role as a political communication instrument that supported the New Order and at the same time showed how the press was used as a tool of power.*

### PENDAHULUAN

Dinamika pers Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, Reformasi, hingga saat ini masih terus dirasakan. Meski penelitian tentang pers

khususnya surat kabar telah banyak dilakukan, namun menarik untuk mengkaji surat kabar yang hidup di masa Orde Baru terutama surat kabar yang bertujuan melayani kepentingan politik suatu golongan. Orde Baru merupakan masa di mana pers seperti mendapat angin segar setelah mengalami pembredelan akibat kontra dengan pemerintah Orde Lama. Selama beberapa waktu, tidak ada masalah antara hubungan pers dan pemerintah, sehingga masa-masa itu disebut sebagai bulan madunya pers dengan pemerintah Presiden Soeharto. Pers diberi kebebasan untuk memberitakan berbagai hal selama tidak mengandung unsur komunis atau mengancam pemerintahan (Hanazaki, 1998: 20).

Pada awal tahun 1970-an masalah mulai timbul sehingga lambat laun kebebasan pers mulai dikekang. Lawan politik Presiden Soeharto mulai bermunculan, dan orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan baru mulai berani menyuarakan pendapat mereka yang mana peristiwa tersebut tak luput dari perhatian pers. “Kebebasan pers adalah mahkotanya Orde Baru”, ujar Let. Jen. Ali Murtopo, yang kemudian disebut sebagai mahkota berkarat oleh Hill (2011: 33) untuk menggambarkan betapa berbedanya dengan kenyataan pers yang berlangsung selama masa Orde Baru.

Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana peran Suara Karya sebagai media komunikasi politik Golkar pada periode tahun 1977—1982. Sebagai koran milik Golkar, Suara Karya menunjukkan keunikan di tengah keterbatasan pers saat itu. Media ini berperan menyebarkan informasi yang sejalan dengan kepentingan Golkar baik dalam menggalakkan program pemerintah maupun membentuk persepsi masyarakat, sementara kritik terhadap pemerintah dibatasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan realita dalam dunia pers saat itu, meski mayoritas surat kabar yang *independent* tetap berupaya memajukan demokrasi dan kebebasan berpendapat, realita yang terjadi adalah media lebih banyak diarahkan sebagai alat pengendalian dan dukungan kekuasaan.

Hubungan antara pers dan negara pada masa Orde Baru dapat dipahami melalui Teori Komunikasi Politik, jika dikaitkan dengan Suara Karya maka surat kabar ini berperan penting dalam kampanye politik menjelang pemilu 1977 dan 1982. Suara Karya dalam komunikasi politiknya juga memberitakan pencapaian pemerintah dan berkontribusi dalam membangun citra Golkar sebagai kekuatan politik yang mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat melalui pesan-pesan politik Golkar yang menekankan pada stabilitas, pembangunan, dan kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemberitaan yang berfokus pada pencapaian pemerintah dalam pembangunan nasional menjadi bagian dari strategi komunikasi politik yang diutamakan dalam Suara Karya.

Penelitian mengenai Suara Karya sebelumnya pernah dilakukan oleh Dicky Prastya dengan judul “Peran Media Massa Dalam Menyuarakan Kebijakan Orde Baru: Studi Kasus Harian Suara Karya 1971—1974” yang mengkaji peran Suara Karya dalam dinamika politik era Soeharto. Sedangkan penelitian ini mengkaji peran Suara Karya mulai dari tahun 1977—1982 yang bertujuan untuk memahami peran Suara Karya sebagai media komunikasi politik dalam membangun narasi, citra politik, dan legitimasi Golkar lewat pemberitaannya. Penelitian ini juga menganalisis *framing* dan pola pemberitaan Suara Karya dalam konteks kampanye pemilu tahun 1977 dan 1982. Kegiatan kampanye politik Golkar yang diberitakan

Suara Karya sangat menarik untuk diteliti, terlebih jika dibandingkan dengan cara Suara Karya meliput kampanye lawan politik Golkar yang sering kali disorot dengan nada negatif. Selain itu, Suara Karya juga secara intens memberitakan mengenai pembangunan yang sangat identik dengan pemerintah Orde Baru. Hubungan struktural antara elite Golkar dan redaksi Suara Karya turut memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan editorial serta kecenderungan pemberitaan yang muncul.

Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana media dapat dibangun bukan hanya sebagai lembaga informasi, tetapi juga sebagai alat kekuasaan. Pemahaman mengenai asal usul Suara Karya membantu menjelaskan bagaimana pemerintah dan kekuatan politik yang dominan saat itu mengatur arus informasi demi mempertahankan stabilitas politik mereka sehingga hal itu dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami politik. Dengan mengkaji editorial Suara Karya, dapat melihat bagaimana agenda politik Golkar dikemas dan disebarkan melalui pemberitaan. Analisis juga membantu menjelaskan bagaimana opini publik dibentuk dan diarahkan melalui kontrol informasi. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran Suara Karya sebagai media komunikasi politik Golkar, kemudian dilanjutkan dengan strategi yang digunakan Suara Karya dalam menyampaikan agenda politik Golkar beserta dampaknya terhadap pembentukan opini publik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo (1994), terdapat 5 tahapan dalam metode penelitian sejarah yang harus dilalui penulis yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Topik yang diangkat adalah surat kabar Suara Karya sebagai objek penelitian dengan batasan waktu ditentukan dari tahun 1977—1982. Setelah menentukan topik, tahapan selanjutnya adalah heuristik atau proses mengumpulkan sumber, terdiri dari sumber primer berupa arsip surat kabar Suara Karya terbitan tahun 1977—1982 yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan sumber sekunder berasal dari buku yang berkaitan dengan topik penelitian di antaranya yaitu, buku karya Rizal Mallarangeng berjudul *Pers Orde Baru: Penelitian Isi Terhadap Kompas dan Suara Karya*, buku karya Ricky Rahmadi berjudul *34 Tahun 1971—2005 Suara Karya Berlayar Menembus Zaman*, buku karya Bahtiar Effendy berjudul *Beringin Membangun Sejarah Politik Partai Golkar*, beserta jurnal, skripsi atau referensi relevan lainnya. Tahapan berikutnya adalah kritik sumber, meliputi kritik eksternal untuk memeriksa aspek fisik pada surat kabar Suara Karya seperti tanggal terbit, bahan, dokumen ditulis tangan atau ketikan, serta dokumen asli atau salinan. Sedangkan kritik internal untuk menilai kredibilitas sumber. Tahap selanjutnya adalah interpretasi, sumber ditafsirkan dengan mengelola fakta secara objektif dan menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh agar membentuk peristiwa sejarah. Penelitian ini menggunakan referensi sezaman dengan mengaitkan sumber buku dan arsip agar membentuk satu kesatuan yang dapat dijadikan kajian. Tahapan terakhir adalah historiografi yaitu merangkai fakta sejarah secara kronologis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kondisi Politik Indonesia Dari Orde Lama Menuju Orde Baru*

Lahirnya Orde Baru ditandai dengan pengangkatan Soeharto sebagai Presiden menggantikan Soekarno yang dianggap gagal menjaga stabilitas negara. Kegagalan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 yang berisi intruksi Presiden untuk memberikan wewenang pada militer untuk memulihkan keamanan negara. Akar peristiwa ini bermula dari Gerakan 30 September 1965 oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menculik dan membantai sejumlah Perwira Tinggi Angkatan Darat dengan dalih melindungi Presiden Soekarno dari kelompok Jenderal yang diduga berencana melakukan kudeta terhadap Presiden pada 5 Oktober 1965 (Roosa, 2008: 4).

Adanya peristiwa tersebut menimbulkan situasi politik dan sosial yang tidak menentu. Dalam kondisi negara yang tidak stabil, Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat muncul menggantikan Letjen Achmad Yani yang gugur dalam tragedi G30S. Pasca peristiwa itu, Soeharto mengadakan rapat dengan kekuatan antikomunis di Kostrad untuk merencanakan serangan balasan dan mencanangkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sehingga pada akhirnya menjadi tema perjuangan Orde Baru (Sulastomo, 2008: 141). Dengan tegas Soeharto mengatakan bahwa jika memiliki landasan yang sama yakni Pancasila dan UUD 1945 maka bersama-sama bisa menghadapi G30S/PKI dan karena itulah gerakan anti G30S/PKI dinamakan KAP Gestapu/Front Pancasila (Kesatuan Aksi Penggayangan G30S/PKI Front Pancasila) (Sulastomo, 2008: 156-157).

Hubungan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Soeharto mulai memburuk karena perbedaan pandangan dalam menyikapi G30S. Soeharto menilai G30S sebagai pengkhianatan besar, sedangkan Presiden Soekarno menganggapnya sebagai gejala kecil dalam Revolusi (Roosa, 2008: 5). Soeharto bersama militer membentuk koalisi dengan mahasiswa melalui organisasi seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), dan lainnya. Setelah Soeharto resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada 16 Oktober 1965, Soeharto mulai melakukan upaya pemberantasan terhadap sisa-sisa G30S dan ormas-ormasnya serta pembersihan sipil/militer dari unsur-unsur G30S (Na'imah, 2015: 125). Pembersihan ini menyebabkan kematian massal, penahanan, pengasingan, dan penghilangan orang-orang yang terduga memiliki ikatan dengan PKI.

Aksi mahasiswa di bawah KAMI dan KAPPI memuncak dengan adanya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) pada 10 Januari 1966 yang berisi 3 tuntutan yaitu bubarkan PKI, rombak pemerintah/kabinet dari unsur-unsur G30S, dan turunkan harga. Perjuangan ini didukung oleh RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) di bawah pimpinan Sarwo Edhie dengan menggabungkan diri ke dalam demonstrasi-demonstrasi (Wanandi, 2014: 59). Adanya tekanan politik yang datang dari militer, mahasiswa, dan kondisi perekonomian yang memburuk menyebabkan perombakan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri (Kabinet Dwikora II) yang terjadi pada 24 Februari 1966. Namun perombakan Kabinet

tersebut tetap menuai kritik karena masih terdapat sejumlah tokoh yang diduga memiliki keterlibatan dengan PKI (Na'imah, 2015: 126). Melihat keadaan negara yang semakin sulit, Presiden Soekarno kemudian mengambil langkah penting untuk mengatasi hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret tahun 1966.

Melalui Supersemar langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah membubarkan PKI, kemudian mengganti 15 Menteri dalam Kabinet Dwikora yang disinyalir sebagai simpatisan PKI. Penggunaan Supersemar selanjutnya difokuskan pada upaya menertibkan situasi nasional dengan tujuan memulihkan kembali fungsi pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat secara umum. Soeharto merasa keberadaan Supersemar saja belum cukup untuk memperkuat posisinya. Oleh karena itu pada 20 Juni 1966 MPRS menggelar sidang untuk mengesahkan Supersemar melalui TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 yang secara resmi mengukuhkan keberadaan Supersemar sekaligus memberi dasar hukum yang kuat bagi penerima mandat untuk menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan (Na'imah, 2015: 126—128).

Presiden Soekarno kemudian diminta memberikan laporan pertanggungjawaban atas sebab-sebab terjadinya peristiwa G30S/PKI. Sebelumnya pada 22 Juni 1966 Presiden Soekarno telah menyampaikan laporan bernama Nawaksara yang berisi sembilan pasal, namun isi laporan tersebut dianggap tidak memuaskan MPRS. Oleh karena itu pada 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyampaikan pelengkap Nawaksara kepada pimpinan MPRS. MPRS menilai Presiden telah lalai menjalankan kewajiban konstitusionalnya, sementara DPR GR mengeluarkan revolusi dan memorandum yang menyatakan bahwa tindakan Presiden Soekarno berpotensi membahayakan negara (Na'imah, 2015: 129). Akibatnya, pada 12 Maret 1967 MPRS mencabut kedudukannya sebagai Presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Setahun kemudian pada 27 Maret 1968 Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia melalui ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 (Kasenda, 2015:168).

### ***Sejarah Terbentuknya Surat Kabar Suara Karya***

Setelah Soeharto resmi menjadi Presiden pada tahun 1968, fokus beralih ke pemilu 1971. Berbekal dari pengalaman Soekarno yang posisinya mudah goyah tanpa partai, Soeharto memilih bergabung dengan Golongan Karya yang tidak berada dalam pengaruh politik manapun. Golkar awalnya bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya yang merupakan wadah golongan fungsional hasil gagasan Soekarno, Soepomo, dan Ki Hajar Dewantara. Menjelang pemilu 1971, Soeharto menegaskan Sekber Golkar harus menjadi pilar utama Orde Baru dan akan maju dalam pemilu 1971 menggunakan satu tanda gambar dengan nama Golongan Karya (Moerdopo dalam Effendy, 2012:77).

Besarnya pengaruh pers tentunya telah disadari oleh banyak kalangan. Kelompok berkepentingan seperti partai politik juga berusaha mendirikan media sendiri untuk menyosialisasikan program kerja mereka, termasuk Suara Karya sebagai media resmi Golkar guna mendongkrak namanya di masyarakat agar dapat bersaing dengan partai yang telah ada sejak kemerdekaan. Suara Karya diterbitkan oleh Yayasan Suara Karya pada 11 Maret

1971 dalam rangka menjelang pemilu pertama di era Orde Baru sekaligus bertepatan dengan peringatan lima tahun Supersemar. Suara Karya digagas oleh Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, Sapardjo, serta Syamsul Basri sebagai pemimpin redaksi pertama, dan didukung oleh kader Golkar lainnya seperti Sumsikum, David Napitupulu, Jusuf Wanandi, Moerdopo, Sugiharto, Rahman Tolleng, Djamal Ali, Cosmas Batubara, dan Soedjati Djiwandono turut berperan dalam perintisan Suara Karya dengan tekad berkontribusi terhadap kemajuan bangsa melalui dunia jurnalistik (Rahmadi, 2005: 4).

Dalam pemilu 1971, Suara Karya dimanfaatkan untuk mengarahkan opini publik agar mendukung Golkar sehingga Golkar dapat meraih mayoritas suara di parlemen (Mallarangeng, 2010: 67). Suara Karya sejatinya berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan Golkar. Kedekatan hubungan historis dan emosional antara Suara Karya dan Golkar menjadikannya secara temporer cenderung *heavy* pada pemberitaan politik khususnya pada sikap politik Golkar. Mulai tahun 1977 saat Indonesia bersiap menyelenggarakan pemilu kedua, pengelola Suara Karya memutuskan untuk menambahkan logo Golkar pada *masthead* Suara Karya yang semakin mempertegas citranya sebagai koran partai. Di tahun yang sama, Yayasan Suara Karya beralih menjadi PT Suara Rakyat Membangun sebagai upaya profesionalisasi media (Rahmadi, 2005: 23—24).

Seiring berjalannya waktu Suara Karya terus berkembang dengan gaya penyajian dan topik liputan yang lebih beragam mencakup berita politik, ekonomi, hukum, kriminalitas, budaya, hiburan, dan olahraga. Bersama CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*), Suara Karya juga menyelenggarakan diskusi isu-isu sosial-politik. Suara Karya juga semakin bervariasi dengan diterbitkannya Suara Karya edisi minggu (SKM) yang menyajikan konten lebih ringan sebagai hiburan bagi para pembaca (Rahmadi 2005: 5). Konten SKM sendiri berupa kesenian, hiburan, keluarga, wisata, cerpen, ramalan zodiak setiap minggunya, dan teka-teki silang. Selain SKM, terdapat kartun yang menjadi maskot Suara Karya bernama Mat Karyo. Mat Karyo adalah hasil goresan tangan karya Bambang Sugeng yang dikemas secara visual berwarna hitam dan putih serta cukup konsisten muncul dalam surat kabar Suara Karya. Mat Karyo sendiri menjadi menarik karena selain berisi hiburan juga mengemas pesan-pesan politik melalui pendekatan yang ringan dan jenaka.

### ***Peran Surat Kabar Suara Karya Sebagai Media Komunikasi Politik Golkar Tahun 1977—1982***

Periode tahun 1977—1982 menjadi masa di mana semakin kuatnya posisi Golkar sebagai kekuatan politik dominan yang didukung secara sistematis melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa. Di tengah iklim politik yang semakin sentralistik dan otoriter, Suara Karya berperan strategis sebagai pengendali wacana publik dengan memperkuat legitimasi Golkar, mendukung program pemerintah, dan secara tidak langsung melemahkan posisi lawan-lawan politiknya. Suara Karya menjadi alat komunikasi politik rezim dengan kontrol negara yang kuat serta pola komunikasi yang bersifat *top and down* di mana negara menjadi pusat produksi wacana yang didistribusikan setelah diselaraskan dengan kepentingan penguasa. Berikut merupakan analisis terhadap surat kabar Suara Karya sebagai media komunikasi politik Golkar.

1. Surat kabar yang lakukan politik praktis harus masuk parpol/Golkar (Suara Karya, 3 Januari 1977)

Dalam komunikasi politik menurut Harold Laswell cara terbaik menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan *Who Says, What In, Which Channel, To Whom, dan With What Effect*. Komunikator utama dalam pemberitaan ini adalah Kas Kopkamtib Laksamana Sudomo, sosok militer yang memiliki otoritas dalam pengendalian politik dan keamanan pada masa Orde Baru. Isi pesan utama berita menegaskan bahwa surat kabar tidak boleh melakukan politik praktis kecuali jika bergabung dalam parpol atau Golkar. Ia juga mengkritik surat kabar yang menyampaikan tulisan bernuansa politik lewat rubrik surat pembaca dan dianggap telah menyimpang dari peran jurnalistik. Melalui Suara Karya sebagai saluran komunikasi yang digunakan, pesan ini disampaikan kepada para pengelola pers agar media tidak melakukan kritik serta tetap menjaga stabilitas politik. Selain itu juga untuk membentuk persepsi masyarakat umum bahwa pemerintah mengawasi pers demi stabilitas dan pers yang ideal adalah pers yang bertanggung jawab. Efek yang dituju dari komunikasi politik ini sendiri adalah mengingatkan pers agar tunduk pada garis politik Orde Baru, membentuk opini bahwa pembatasan pers adalah hal wajar demi ketertiban, dan membatasi ruang penulisan pers sehingga meminimalisir adanya kritik terbuka.

2. Rumah sub inti untuk tukang sayur dll mulai diperkenalkan (Suara Karya, 3 Desember 1979)

Dalam pemberitaan ini, komunikator yang menyampaikan pesan adalah Drs. Cosmas Batubara selaku Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat. Pesan yang disampaikan adalah menyoroti kunjungannya ke Kalimantan Selatan untuk memperkenalkan proyek rumah sub inti bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti tukang becak, tukang sayur, dan tukang tahu. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan dan perbaikan kampung kumuh lewat proyek KIP (*Kampung Improvement Program*). Drs. Cosmas meminta pengertian masyarakat agar membantu terlaksananya program tersebut dengan menegaskan bahwa proyek ini bukan penggusuran, melainkan perbaikan lingkungan agar sehat dan teratur. Dalam konteks teori pers pembangunan Wilbur Schramm, pemberitaan ini mencerminkan bahwa fungsi media bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk sikap dan mendorong perilaku yang mendukung pembangunan nasional. Suara Karya menjadi saluran komunikasi dalam menyebarkan program pemerintah dan membangun legitimasi kekuasaan melalui narasi kemajuan, menampilkan negara sebagai aktor utama dan rakyat sebagai penerima manfaat. Sehingga efek yang diharapkan adalah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas hidup sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

3. Adam Malik: Golkar lebih ampuh dari yang lain (Suara Karya, 1 Maret 1977)

Memberitakan kampanye Adam Malik sebagai komunikator yang merupakan Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Pusat Golkar. Pesan Adam Malik kepada ribuan massa di Kebon Kacang, Tanah Abang adalah Golkar merupakan kekuatan politik paling efektif dalam menjalankan pembangunan nasional. Jika Golkar diumpakan sebagai alat, maka terbuat dari besi sehingga lebih ampuh daripada alat-alat lainnya, keberhasilan

pemerintahan sekarang tidak terlepas dari peran hebat Golkar. Ia juga mengatakan Golkar ibarat sate di Tanah Abang. Memilih Golkar atau Parpol lain sesuai selera masing-masing, namun jika memilih Golkar pasti lebih sehat dan kuat. Khalayak yang dibidik adalah massa pemilih baik yang hadir dalam kampanye maupun masyarakat luas yang menerima pesan lewat media, sehingga efek yang diharapkan adalah timbulnya keyakinan masyarakat untuk memilih Golkar pada pemilu yang akan datang. Dalam perpektif agenda setting Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw, media berfungsi untuk menseleksi dan menekankan beberapa topik (Efendi *et al.*, 2023: 1717). Pemberitaan ini menunjukkan media menentukan isu penting bagi publik, di mana Suara Karya menempatkan kampanye Golkar dan ucapan Adam Malik sebagai isu utama. Dengan demikian, Suara Karya tidak bertindak sebagai media netral sehingga mencerminkan komunikasi politik otoriter di mana media menjadi wadah wacana tunggal bukan sebagai pengawas kekuasaan (*watch dog*).

#### 4. Menteri PU di Bandung: Indonesia Pernah Sakit Keras Sebelum Orde Baru Lahir (Suara Karya, 5 April 1982)

Pemberitaan Suara Karya mengenai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Purnomosidi Hadjisaros bahwa “Indonesia pernah sakit keras sebelum Orde Baru lahir” menunjukkan bagaimana media menjalankan fungsi agenda setting dengan mengarahkan perhatian publik pada narasi yang menguntungkan pemerintah. Dengan menempatkan isu tersebut sebagai fokus utama, Suara Karya menampilkan Orde Baru sebagai penyelamat bangsa dari keterpurukan serta memperkuat isu ini dengan menghadirkan pernyataan Menteri bahwa kehadiran Pak Harto menyelamatkan bangsa dari penyakit keras komunis. Reaksi massa berupa teriakan “*Hidup Golkar*”, “*Golkar Menang*”, “*Hidup Pak Harto*” disertakan dalam berita sebagai cara media dalam mendukung tingkah laku komunikasi sesuai apa yang diinginkan komunikatornya, sehingga seolah menunjukkan bahwa publik telah menyepakati narasi yang disampaikan. Dalam kerangka agenda setting, media tidak hanya menentukan isu apa yang harus dianggap penting, tetapi juga membingkai bagaimana suatu isu dipahami sehingga menimbulkan pengaruh dan interpretasi tertentu yang dapat menciptakan opini publik.

#### ***Pemberitaan Penyudutan Oposisi dalam Suara Karya***

##### 1. Pelanggaran Tanda Gambar Pemilihan Umum 1982 (Suara Karya, 5 April 1982).



Dalam masa kampanye, gambar dan simbol partai yang ditempel di tempat-tempat umum menjadi alat penting untuk menarik perhatian masyarakat. Dalam dokumentasi Suara Karya terlihat adanya suatu peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran kampanye pemilu. Masalah yang ditonjolkan adalah tindakan tidak tertib di mana tanda gambar pemilihan umum 1982 (nomor 2) beserta lambang Golkar di bawahnya ditindih dengan tanda gambar milik Partai Persatuan Pembangunan. Penyebabnya sendiri dikatakan berasal dari orang-orang tidak bertanggung jawab, yang secara tersirat diarahkan kepada pendukung PPP. Tindakan tersebut dinilai sebagai sesuatu yang buruk, melanggar aturan, dan merusak ketertiban pemilu. Meskipun tidak diungkap secara langsung, teks dalam berita memberi kesan bahwa solusi yang diharapkan adalah penertiban alat peraga kampanye serta perlunya pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Secara keseluruhan, *framing* ini menempatkan Golkar sebagai pihak yang dirugikan dan menampilkan pelaku penindihan gambar sebagai pihak yang salah.

### ***Strategi Suara Karya dalam Menyampaikan Agenda Politik Golkar dan Dampaknya Terhadap Pembentukan Opini Publik***

Golkar menggunakan strategi unggulan yang mengutamakan kedekatan dengan masyarakat melalui program sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui bantuan langsung kepada kelompok yang membutuhkan (Jaya *et al.*, 2025: 17). Keberhasilan dalam menjalankan strateginya turut diperkuat oleh Suara Karya yang menyampaikan program-program Golkar, keberhasilan pembangunan, dan memperkuat citra Golkar di mata umum. Suara Karya juga melibatkan tokoh berpengaruh yang memiliki *track record* positif untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut dengan menggunakan komunikasi yang bersifat mengajak serta menekankan narasi positif dan optimisme tentang masa depan. Dengan demikian, Suara Karya berperan penting sebagai media yang menautkan dukungan pada Golkar dengan loyalitas terhadap Presiden Soeharto, menggambarkan oposisi sebagai pengacau stabilitas, serta membingkai Golkar sebagai kekuatan yang identik dengan ketertiban dan kemajuan.

#### **1. Rubrik Kenapa saya pilih Golkar (Suara Karya, 24 Maret 1977)**

Rubrik tokoh dalam Suara Karya menampilkan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja selaku komunikator yang menyampaikan dukungannya pada Golkar dengan berorientasi pada stabilitas dan pembangunan nasional. Pesan utama yang disampaikan adalah Golkar merupakan alternatif terbaik karena belum ada orang/organisasi lain yang mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk pembangunan bangsa seperti Golkar. Dikatakan pula bahwa Golkar punya rencana, tenaganya cukup, dan pengalamannya banyak dalam pembangunan sehingga perkataan Prof. Mochtar ini mengukuhkan citra Golkar sebagai kekuatan politik yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mampu untuk merealisasikan program-program yang ditawarkan. Dengan adanya rubrik ini, Suara Karya menempatkan Golkar sebagai saluran politik rasional dan terpercaya. Pesan ini tentunya diarahkan bagi masyarakat umum yang membaca surat kabar Suara Karya, dengan

menyisipkan pernyataan dari seorang tokoh penting diharapkan dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat yang masih bimbang dengan pilihannya sehingga dari keraguannya itu mereka menjadikan arahan dari tokoh yang menyampaikan pesan tersebut sebagai pertimbangan atas pilihannya.

2. Prof. Dr. Emil Salim di Riau: Bila Salah Pilih Rakyat Indonesia Akan Kembali Ke Jaman Penuh Penderitaan (Suara Karya, 7 April 1982)

Dalam pemberitaan mengenai pernyataan Prof. Emil Salim, *framing* yang dibangun adalah bahwa memilih Golkar menjadi satu-satunya jalan aman untuk masa depan bangsa. Masalah yang dibahas dalam berita ini terkait ancaman besar bagi pembangunan nasional apabila rakyat Indonesia “salah pilih”. Prof. Emil menggambarkan masa Orde Lama sebagai jaman yang penuh penderitaan akibat banyaknya pratai-partai yang berkuasa, ia membingkai kondisi tersebut sebagai masalah yang bisa terulang jika Golkar tidak memimpin. Dengan kata lain, masalah yang dikhawatirkan adalah resiko kemunduran bangsa karena tidak terlaksananya pembangunan dengan baik seperti yang saat ini sudah dirasakan. Penyebab permasalahannya sendiri karena kemajuan baru dirasakan sejak Golkar memimpin setelah di masa sebelumnya sulit mengambil kesepakatan akibat banyaknya perbedaan pandangan. Selain itu, karena PDI dan PPP belum mengusungkan calon lain, Prof. Emil mengajak pengikut PDI dan PPP yang juga memilih Presiden Soeharto untuk mendukung Golkar. Pesan yang disampaikan Prof. Emil mengandung nilai moral bahwa memilih Golkar adalah pilihan yang benar karena Golkar bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa, sedangkan memilih partai lain selain Golkar digambarkan sebagai sesuatu yang bisa membuat rakyat kembali menderita seperti di masa lalu. Penggunaan kata “kita” mengartikan bahwa pemerintah bersama seluruh masyarakat akan menderita jika tidak memilih Golkar dan *framing* “bila salah pilih” dalam judul berita ini menekankan penyudutan terhadap oposisi sehingga bertujuan untuk menyatupadukan seluruh suara agar mendukung Golkar. Penyelesaian masalah yang diharapkan adalah dengan memilih Golkar untuk menjaga stabilitas, pembangunan, dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai.

3. Dari Kampanye P3: Massa Beratribut Ka’bah Timbulkan Gangguan<sup>2</sup> (5 April 1982)

Dalam Suara Karya oposisi jarang tampil, namun sekalinya tampil justru menyoroti gangguan yang mengarah pada kekacauan sosial. Pemberitaan Suara Karya mengenai kampanye PPP menunjukkan bagaimana media dapat mengatur agenda publik melalui pemilihan isu yang ditonjolkan. Dalam teori agenda setting, media juga dapat menentukan apa yang masyarakat pikirkan dan cemaskan. Pemberitaan ini menyampaikan mengenai gangguan yang dialami masyarakat akibat kampanye PPP dengan menempatkan informasi mengenai pelemparan batu, pemukulan warga, penyerangan aparat pemerintah, hingga perlawanan massa terhadap aparat di berbagai daerah mulai dari Jakarta, Kudus, Pasuruan, Bogor, hingga Irian Jaya. Suara Karya memposisikan PPP sebagai sumber kerusuhan dalam isu utama pemberitaannya. Agenda setting dalam berita ini ditunjukkan melalui penonjolan frekuensi dan intensitas laporan kekerasan yang melibatkan PPP. Ketika berbagai insiden dipilih, diulang, dan diperluas cakupannya secara nasional, media mengarahkan perhatian pembaca bahwa masalah utama dalam pemilu adalah gangguan yang berasal dari PPP.

Pemberitaan ini menunjukkan bagaimana agenda setting bekerja sebagai alat politik, dengan memusatkan perhatian pada tindakan negatif PPP sambil mengangkat keberhasilan Golkar dalam berita-berita lain, Suara Karya membatasi ruang gerak oposisi di ruang publik dan mempersempit legitimasi politik mereka.

### **Strategi Suara Karya Melalui Kartun Mat Karyo**



Sumber: Surat Kabar Harian Suara Karya

Kartun ini menggambarkan tokoh Mat Karyo yang sedang berjalan di tengah hujan lalu berteduh di bawah pohon beringin sambil berkata, "Untung ada pohon beringin disini ya mas!" Secara simbolik, tentunya kita tahu bahwa pohon beringin adalah lambang dari Golkar. Kalimat di atas jika dibaca sekilas memang terlihat seperti ungkapan rasa syukur karena tidak kehujanan sebab berteduh di bawah pohon beringin, tetapi jika dilihat dari konteks Mat Karyo yang isinya menyerempet isu politik terutama ketika masa kampanye, kalimat tersebut dapat diartikan sebagai rasa aman dan terlindung berkat keberadaan Golkar. Dengan gaya gambar dan bahasa yang sederhana, pesan politik disisipkan secara halus agar mudah diterima oleh masyarakat luas terutama bagi pembaca awam. Ini adalah bentuk propaganda yang bertujuan memperkuat citra Golkar sebagai pelindung untuk rakyat di tengah hujan atau bisa diartikan sebagai kondisi politik yang tidak stabil, sebagaimana disebutkan dalam (Effendy *et al.*, 2012: 78) arti pohon beringin sebagai lambang Golkar adalah melambangkan pengayoman dan kebijaksanaan. Mat Karyo ini memperlihatkan bagaimana Suara Karya ikut mengambil peran dalam kampanye politik Orde Baru dengan menyisipkan pesan propaganda dalam bentuk visual dengan cerita sederhana.

### **Dampak Terhadap Pembentukan Opini Publik**

Pemberitaan yang konsisten dan dominan dari Suara Karya mengenai Golkar ikut menciptakan opini publik bahwa Golkar adalah pilihan yang tepat dan aman bagi masa depan bangsa. Melalui pemberitaan seperti keberhasilan pembangunan dapat menarik kepercayaan masyarakat melalui kedekatan yang ditunjukkan dengan narasi-narasi positif serta dukungan dari tokoh penting pada masa Orde Baru. Dengan adanya usaha sistematis dari penggunaan surat kabar Suara Karya, Golkar tidak hanya menguasai ruang komunikasi publik, melainkan juga mampu mengonsolidasikan dukungan politik. Hal ini tercermin dari kemenangan Golkar dalam pemilu tahun 1977 dan 1982 yang mana peran Suara karya

sebagai media resmi membuatnya sangat efektif dalam menyampaikan pesan politik negara. Berikut dilampirkan perolehan suara Golkar dalam pemilu tahun 1977 dan 1982.

**Tabel 1** Perolehan suara Golkar dalam pemilu tahun 1977 dan 1982

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
<b>Jumlah</b>		<b>63.998.344</b>	<b>100,00</b>	<b>360</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: kpu.go.id

Pemilu tahun 1977 menunjukkan dominasi Golkar di antara dua partai politik lainnya. Golkar berhasil memperoleh suara sebesar 62,11% atau sekitar 39,7 juta suara yang mengantarkan mereka meraih 232 kursi di DPR. Kemudian PPP menjadi kekuatan oposisi terbesar dengan perolehan suara sebesar 29,29% atau sekitar 18,7 juta suara dan memperoleh 99 kursi di DPR. Sementara itu PDI hanya mampu meraih 8,60% suara atau sekitar 5,5 juta suara dan mendapat 29 kursi. Berdasarkan hasil kemenangan Golkar dalam pemilu tahun 1977, pemerintah memperoleh dukungan yang stabil di parlemen. Hal ini tercermin dalam Sidang Umum MPR tahun 1978 di mana Golkar berperan penting dalam merumuskan Trilogi Pembangunan yang meliputi pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas nasional sebagai landasan utama program pemerintah dalam GBHN. Kemudian salah satu agenda penting sidang tersebut adalah pembahasan mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Dalam agenda pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Golkar bersama kekuatan pendukung Orde Baru lainnya lebih mudah meyakinkan partai-partai politik agar kembali menetapkan Soeharto sebagai Presiden dengan Wakil Presiden Adam Malik (Effendy *et al.*, 2012: 96—97). Keyakinan Golkar mampu mengajak parpol lain untuk memilih Soeharto kembali menjadi Presiden bukanlah tanpa sebab, melainkan dari parpol lainnya itu sendiri yang menyatakan dukungannya untuk Presiden Soeharto, sebagaimana dikatakan oleh Ketua PDI Drs. Hardjanto bahwa Soeharto adalah pilihan yang tepat untuk menjadi Presiden RI kembali. Ia menilai bahwasanya Presiden Soeharto berusaha keras untuk mensukseskan konsepsi pembangunannya serta keberhasilannya sangat terasa bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan (Suara Karya, 19 Januari 1978). Dengan adanya keyakinan dari parpol lain menjadi keuntungan bagi Golkar dan pendukung Orde Baru agar kembali menetapkan Soeharto sebagai Presiden selanjutnya dengan lancar.

Menjelang pemilu tahun 1982, persiapan Golkar terlihat semakin matang dan terorganisir. Meskipun peraturan kampanye saat itu lebih ketat, Golkar terlebih dulu melakukan mobilisasi dukungan sejak jauh hari. Pegawai negeri kembali dikonsolidasikan agar tetap loyal kepada Golkar. Sementara ABRI turut berperan mengenalkan Golkar melalui program ABRI Masuk Desa. Hasil pemilu 1982 sebagaimana yang diharapkan Golkar mampu

memperoleh 64,34% suara atau sekitar 48,3 juta meningkat dibanding hasil pemilu tahun 1977. Sementara itu PPP dapat 27,78% dengan jumlah suara 20,8 juta. Adapun PDI memperoleh 7,88% dengan jumlah suara 5,9 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi Golkar dalam mengamankan dukungan publik membuahkan hasil (Effendy *et al.*, 2012: 102—103).

**Tabel 1** Perolehan suara PDI dalam pemilu tahun 1977 dan 1982

No.	Partai	Suara DPR	%	Kursi	% (1977)	Keterangan
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+ 2,23
2.	PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	- 1,51
3.	PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	- 0,72
<b>Jumlah</b>		<b>75.126.306</b>	<b>100,00</b>	<b>364</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: kpu.go.id

Pada pemilu tahun 1982, posisi dominan Golkar tidak hanya bertahan tetapi juga semakin menguat. Golkar berhasil mendapat tambahan 10 kursi sehingga total kursi DPR yang dikuasai menjadi 242. Hasil perbandingan dua pemilu ini memperlihatkan bahwa strategi politik dan komunikasi Golkar mampu menjaga kesinambungan dukungan publik. Kemenangan di pemilu 1977 menjadi fondasi bagi Orde Baru, sementara kemenangan yang lebih besar di pemilu 1982 menunjukkan adanya konsolidasi politik yang semakin mantap. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran berbagai *instrument* negara salah satunya yaitu media resmi seperti Suara Karya yang terus membentuk opini publik dan mengarahkan narasi keberhasilan pembangunan. Melalui tabel hasil pemilu yang ditampilkan memperlihatkan bahwa Golkar semakin didukung oleh publik sementara PPP hanya mengalami sedikit kenaikan di beberapa daerah dan PDI berada di kedudukan yang stagnan.

Kemenangan besar Golkar dalam pemilu tidak dapat dilepaskan dari tingginya respons positif publik terhadap kampanye dan citra partai tersebut. Dukungan ini tercermin sejak dimulainya hari pertama masa kampanye tahun 1977, sebagaimana salah satu contoh antusiasme publik yang dilaporkan oleh Suara Karya di bawah ini.

1. Pohon Beringin Pasti Top (Suara Karya, 25 Februari 1977)

Laporan wartawan Suara Karya pada hari pertama kampanye menyebutkan kegiatan berlangsung tertib dan cukup menggembirakan. Dalam liputannya menampilkan dukungan rakyat kecil terhadap Golkar yang sebenarnya hal ini jarang sekali muncul di surat kabar Suara Karya. Ditampilkannya wawancara rakyat tentang kampanye pemilu menjadi bukti respon publik terhadap Golkar meskipun hanya suara tertentu yang dimunculkan membentuk opini mayoritas. Seperti halnya Mamat, kenek colt 24 tahun asal Kampung Depok mengenakan kaos bergambar pohon beringin karena bangga pada Golkar dan berharap agar Golkar memperbaiki nasib rakyat kecil. Harapan ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat bawah terhadap Golkar dan keberhasilan kampanye Golkar diterima dengan baik. Sejak pemilu 1971, mayoritas penduduk sekitar pasar Depok memilih Golkar dan kembali menyatakan dukungan pada pemilu 1977 dengan menyebut pohon beringin pasti top. Dapat

dilihat bahwa opini publik yang dibentuk sejak kampanye pemilu tahun 1971 masih melekat kuat sehingga Golkar berhasil melakukan strategi komunikasi yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Surat kabar Suara Karya adalah media partisan yang menjadi wadah bagi Golkar dan Orde Baru dalam menyampaikan kepentingan politik mereka. Suara Karya terbit pertama kali pada 11 Maret 1971. Dibentuknya Suara Karya adalah atas inisiasi Ali Moertopo yang menginginkan agar Golkar memiliki media untuk memperkenalkan eksistensinya pada masyarakat, terutama ketika akan menghadapi pemilu tahun 1971 di mana Golkar yang pada saat itu baru terjun ke dalam dunia politik memerlukan cara untuk menaikkan elektabilitasnya di masyarakat. Berita politik dalam Suara Karya berisi seputar informasi mengenai pemerintahan Indonesia, politik luar dan dalam negeri, pemberitaan kampanye ketika periode pemilu, serta pemberitaan mengenai pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberitaan surat kabar Suara Karya, dapat disimpulkan bahwa surat kabar ini secara konsisten berperan sebagai alat komunikasi politik utama Golkar dalam mempertahankan hegemoninya pada masa Orde Baru. Suara Karya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi secara aktif membangun narasi yang menguntungkan Golkar dengan berbagai strategi pemberitaan seperti menonjolkan keberhasilan pembangunan, menampilkan kedekatan Golkar dengan rakyat kecil, serta mengidentikkan stabilitas nasional dengan keberadaan Golkar. Selain itu, Suara Karya secara rutin menegaskan bahwa stabilitas dan pembangunan hanya dapat terwujud jika masyarakat mendukung Golkar sekaligus menstigmatisasi pilihan politik lain sebagai ancaman bagi kemajuan bangsa. Pola pemberitaan ini turut membentuk persepsi yang mempersempit ruang kritik dan menekan munculnya alternatif politik lain. Secara keseluruhan, analisis terhadap arsip surat kabar Suara Karya menunjukkan bahwa surat kabar ini menjadi corong propaganda politik Golkar yang efektif dalam pembentukan opini publik yang masif serta turut mengantarkan kemenangan Golkar dalam pemilu 1977 dan 1982.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Erwan et al. (2023). Teori Agenda Setting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715—1718.
- Effendy, Bahtiar et al. (2012). *Beringin Membangun Sejarah Politik Partai Golkar*. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu. Diakses dari: [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32844/1/Bahtiar\\_Beringin.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32844/1/Bahtiar_Beringin.pdf)
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Komunikasi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Hanazaki, Yasuo. (1998). *Pers Terjebak*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Hill, David T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jaya, Arni., La Ode Harjudin & La Ode Muh Elwan. (2025). Strategi Partai Politik Golkar Pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Kendari. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 3(1), 13—19.
- Kasenda, Peter. (2015). *Sarwo Edhie dan Tragedi 1965*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Pemilu 1977—1997. Kpu.go.id.  
<https://www.kpu.go.id/page/read/10/pemilu-1977-1997> (Diakses pada 31 Juli 2025, pukul 17.30 WIB).
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mallarangeng, Rizal. (2010). *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Na'imah, Hayatun. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(1), 120—138.
- Rahmadi, Ricky. (2005). *34 Tahun 1971-2005 Suara Karya berlayar Menembus Zaman*. Jakarta: Badan Litbang HU Suara Karya Tahun 2005.
- Roosa, John et al. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Suara Karya, 3 Januari 1977. Surat Kabar yg Lakukan Politik Praktis Harus Masuk Parpol/Golkar.
- Suara Karya, 1 Maret 1977. Adam Malik: Golkar Lebih Ampuh Dari yang Lain.
- Suara Karya, 24 Maret 1977. Kenapa Saya Pilih Golkar Mochtar Kusumaatmadja.
- Suara Karya, 25 Februari 1977. Pohon Beringin Pasti Top.
- Suara Karya, 19 Januari 1978. Soeharto Pilihan yang Tepat.
- Suara Karya, 3 Desember 1979. Rumah Sub Inti Untuk Tukang Sayur Dll Mulai Diperkenalkan.
- Suara Karya, 5 April 1982. Dari Kampanye P3: Massa Beratribut Ka'bah Timbulkan Gangguan2.
- Suara Karya, 5 April 1982. Menteri PU di Bandung: Indonesia Pernah Sakit Keras Sebelum Orde Baru Lahir.
- Suara Karya, 7 April 1982. Prof. Dr. Emil Salim di Riau: Bila Salah Pilih Rakyat Indonesia Akan Kembali Ke Jaman Penuh Penderitaan.
- Sulastomo. (2008). *Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wanandi Jusuf. (2014). *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia Tahun 1965-1998*. Jakarta: Kompas.